

# EFEKTIVITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS *E-GOVERNMENT* DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh

**Manuel De Araujo Mau** <sup>(1)</sup>,  
**Hyronimus Rowa** <sup>(2)</sup>, **Ali Hanafiah Muhi** <sup>(3)</sup>

<sup>1)</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Belu  
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
manueldearma89@gmail.com

<sup>2,3)</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

---

## ABSTRACT

*THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM  
REGIONAL E-GOVINION BASED IN BELU DISTRICT, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE*

*Development Planning System in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. The purpose of this study is to see and analyze the effectiveness of the E-Government-based Regional Development Planning System in Belu Regency and to describe and formulate strategies in increasing the effectiveness of the E-government-based Regional Development Planning System in Belu Regency.*

*This study uses Wilkinson's theory which has system effectiveness as seen from 11 system indicators, namely relevant, efficient, timeliness, accessibility, accuracy, security, capacity, assistance, economy and simplicity. The approach used in data analysis is the SWOT analysis and the Litmus test which is used to analyze strategies that can be used to improve the effectiveness of the e-government-based regional development planning system in Belu Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. In collecting data, researchers made observations, interviews, documentation.*

*The results showed that the E-Government Based Regional Development Planning System in Belu Regency was not yet effective. This can be seen from 11 indicators of information systems from Wilkinson where there are still problems, especially in the aspect of indicators, namely: relevance, accessibility, problems, vulnerability, and the economy. The strategies used to increase the effectiveness of the E-Government-Based Regional Development Planning System in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, namely: (1) Using a computer laboratory to conduct training for all SIMREDA Operators for each OPD in Belu Regency (2) Encouraging program development/Activities that refer to efforts to utilize existing regional potentials (3) Utilizing information technology and SIMREDA applications in regional development planning (4) conducting analysis, research, development and optimization of planning data/information management (5) Improving coordination and communication between planning OPD (6) Increasing participatory planning (7) Improving the quality of reporting and the achievement of performance accountability, and (8) Publishing Standard Operating Procedures.*

**Keywords:** *effectiveness, SIMREDA, e-planning*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-Government* di Kabupaten Belu dan untuk mendeskripsikan dan merumuskan strategi dalam meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-government* di Kabupaten Belu.

Penelitian ini menggunakan teori dari Wilkinson terkait efektivitas sistem yang dilihat dari 11 indikator sistem, yaitu relevan, efisien, ketepatan waktu, aksesibilitas, akurat, keamanan, kapasitas, fleksibilitas, keandalan, ekonomi dan kesederhanaan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Litmus Test yang digunakan untuk menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-government* di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-Government* di Kabupaten Belu belum efektif. Hal ini tampak dari 11 indikator sistem informasi dari Wilkinson di mana masih mengalami kendala, terutama pada aspek indikator, yaitu: relevan, aksesibilitas, kapasitas, keandalan, fleksibilitas, dan ekonomi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-Government* di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: (1) Menggunakan laboratorium Komputer untuk mengadakan pelatihan kepada semua Operator SIMREDA setiap OPD di Kabupaten Belu (2) Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada upaya pemanfaatan potensi daerah yang ada (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIMREDA dalam perencanaan pembangunan daerah (4) Melakukan analisis, penelitian, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan data/informasi perencanaan (5) Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan antar OPD (6) Peningkatan perencanaan partisipatif (7) Peningkatan kualitas pelaporan dan capaian akuntabilitas kinerja, dan (8) Terbitkan Standar Operasional Prosedur.

**Kata kunci:** efektivitas, SIMREDA, *e-planning*

## PENDAHULUAN

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu adalah badan teknis yang bertugas untuk melakukan penelitian dan merencanakan pembangunan dan pengembangan daerah di Kabupaten Belu. Badan ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Sebelum keluarnya UU no. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan ini dinamakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perubahan nomenklatur tersebut

diharapkan juga agar semakin inovatif dan kreatif para aparatur yang berada di BP4D. Untuk itu, dalam menghadapi generasi 4.0, BP4D telah mengadopsi *e-government* untuk membantu tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah. *E-government* yang dimaksud dinamakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMREDA).

Penerapan *e-government* di setiap daerah memiliki kendala dan permasalahnya masing-masing. Di Kabupaten Belu kendala dalam penerapan *e-government* (SIMREDA) yaitu seperti kondisi dan letak geografis, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan lain sebagainya.



Gambar 1

Tampilan SIMREDA Kab. Belu

Sumber: <http://simreda.belukab.go.id/web/home>

Dalam penerapan SIMREDA di Kabupaten Belu dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, namun kenyataan yang terjadi bahwa pengembangan sumber daya manusia khususnya Aparatur Sipil Negara yang menangani/Operator SIMREDA di BP4D Pemerintahan Kabupaten Belu masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1** Data Pendidikan Operator SIMREDA BP4D Pemerintahan Kabupaten Belu Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jml	%	Ket.
1	S-2	4	16,0	-
2	S-1/ Diploma IV	13	52,0	2 orang S-1 (IT)
3	Diploma III	5	20,0	-
4	SMA & Sederajat	3	12,0	-
Jml		25	100	

Sumber: BP4D Kab. Belu Ta. 2019

Menyikapi permasalahan di atas, maka perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam mempersiapkan aparat untuk mencapai

tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik, serta pengalokasian anggaran yang memadai guna menghasilkan pelayanan yang cepat efektif dan efisien. Informasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan transparansi dalam penyusunan anggaran *e-planning* melalui SIMREDA.

### ► Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana Informatika Telekomunikasi (IT).
2. Akses jaringan internet yang belum stabil.
3. Terbatasnya kompetensi sumber daya aparatur yang kompeten dalam mendukung penerapan e-government.
4. Sumber Daya anggaran yang dialokasikan terbatas
5. Belum terintegrasinya aplikasi e-planning dengan e-budgeting.
6. Belum adanya standarisasi yang baku mengenai penggunaan *e-planning* dari pemerintah pusat.

## ► Tujuan Penelitian

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka peneliti harus mencari informasi guna mencapai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-Government* di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan strategi dalam meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-government* di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengidentifikasi temuan berdasarkan fakta dan informasi di lapangan dengan mendeskripsikan dan menganalisis menggunakan teori Efektivitas menurut Wilkinson.

Peneliti menjadi instrumen penting dalam penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Informan dalam penelitian ini, yakni pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu. Alasan peneliti memilih lokasi di BP4D karena BP4D sebagai pusat penelitian dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belu di mana sebagai badan teknis yang bertugas untuk melakukan perencanaan, pembangunan di Kabupaten Belu dengan memanfaatkan teknologi dan informasi perencanaan berupa aplikasi *e-planning* (SIMREDA).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai pembanding dan referensi. Penelitian tersebut antara lain di bawah ini.

1. Tesis, Universitas Negeri Padang (2018), oleh Ramela Veruzia, melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: “Efektivitas Perencanaan Aplikasi Sistem *Database* Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat”.
2. Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia (2002), oleh Diding Gusutardy, melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: “Efektivitas penggunaan Informasi dalam proses perencanaan pada Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis”.
3. Tesis, Universitas Brawijaya (2014), oleh Budhi Setianingsih, melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul: “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)”.
4. Tesis, Universitas Pasundan (2013), oleh Herti Suherti Rachmi Dewi, melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: “Analisis Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat”.
5. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Universitas Terbuka (2016), oleh Yoga Saputra, melakukan penelitian dalam rangka untuk menyusun TAPM dengan judul: “Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur”.

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan kajian Pustaka sebagai berikut.

### Pemerintahan Daerah

Taliziduhu Ndraha (2011: 6), mengemukakan, pemerintah:

Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya.

Pemerintah daerah itu sendiri menurut UU No. 23 Tahun 2014, terdiri dari “gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.” (UU No. 23 Tahun 2014). Gubernur, bupati, dan wali kota tersebut merupakan sebutan bagi kepala daerah di wilayah pemerintahannya masing-masing, yaitu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan Timor Leste. Perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah ini cukup besar

### Organisasi Perangkat Daerah

Hasibuan (2011: 120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu terdapat enam puluh empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu pemerintah (Bupati) dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah/menjalankan visi misi Bupati. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) sebagai OPD teknis yang melakukan perencanaan, penelitian, dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Belu dapat melakukan inovasi dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Belu.

### Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil dan berhasil guna. Efektif merupakan kata dasar, sedangkan efektivitas merupakan kata sifat. Pengertian tentang efektivitas telah banyak diberikan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan definisi yang berbeda-beda pula.

Lebih detail pengukuran untuk menilai apakah sistem yang ada akan lebih efektif dan efisien maka peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh Wilkinson dalam Marianus Sinaga (1986: 249) yang mengemukakan sebelas indikator dalam mengukur efektivitas sistem informasi, yaitu sebagai berikut.

1. Relevan, sehubungan dengan sistem atau perangkat yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan instansi dan pihak lain yang akan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem/perangkat.

2. Efisiensi, berarti meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi sebagai input material dan pemeliharaan dari *database*.
3. Ketepatan waktu, terkait dengan aplikasi yang sudah ada atau yang digunakan, harus dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan tepat waktu. Keterlambatan dalam menghasilkan informasi akan mengurangi nilai dan kegunaan informasi dan apabila informasi yang diterbitkan tepat waktu dapat memfasilitasi operasi sistem.
4. Aksesibilitas, berarti kemudahan akses pelayanan dalam memperoleh data informasi yang selalu baru (*up to date*).
5. Akurat, informasi yang akurat adalah informasi yang tepat, dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan, sehingga akan lebih berguna bagi informasi.
6. Keamanan, sistem yang digunakan harus bebas dari kerugian dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.
7. Kapasitas, sistem dalam mengukur kapasitas peralatan dan perangkat.
8. Fleksibilitas, kemudahan dalam memperoleh informasi.
9. Keandalan Sistem, keandalan suatu sistem seperti ketahanan.
10. Ekonomi merupakan, biaya dapat dikurangi dan layanan dapat ditingkatkan.
11. Kesederhanaan, pengoperasian sistem harus lebih mudah dalam penggunaannya.

Penulis menggunakan teori efektivitas sistem dari Wilkinson untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-government* di Kabupaten Belu. Teori ini peneliti gunakan karena peneliti berpendapat bahwa item/indikator tersebut sesuai dengan kondisi real/karakteristik di lapangan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kendala pada saat dilakukan penelitian.

## Perencanaan Pembangunan Daerah

Arthur W. Lewis dalam Sjafrizal (2006: 24) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai “suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif”.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah diperlukan koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holiholistic komprehensif. Selain itu, Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensidaerahnya, sehinggakoordinasisekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

## E-Government

Menurut Rianto dan Lestari (2012:68) mengatakan bahwa *e-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

Perkembangan Teknologi dan Informatika yang semakin pesat membawa banyak manfaat bagi manusia. Teknologi dan informatika telah diadopsi dan dipakai di segala bidang untuk memudahkan tugas manusia. Salah satunya di bidang Pemerintahan, yang lebih dikenal dengan istilah *e-governmnet* (*e-gov*). Perkembangan jaman yang pesat dan reformasi birokrasi menuntut pelayanan tidak bersifat manual melainkan sudah bersifat daring/online agar hasil yang diperoleh lebih efektif dan efisien.

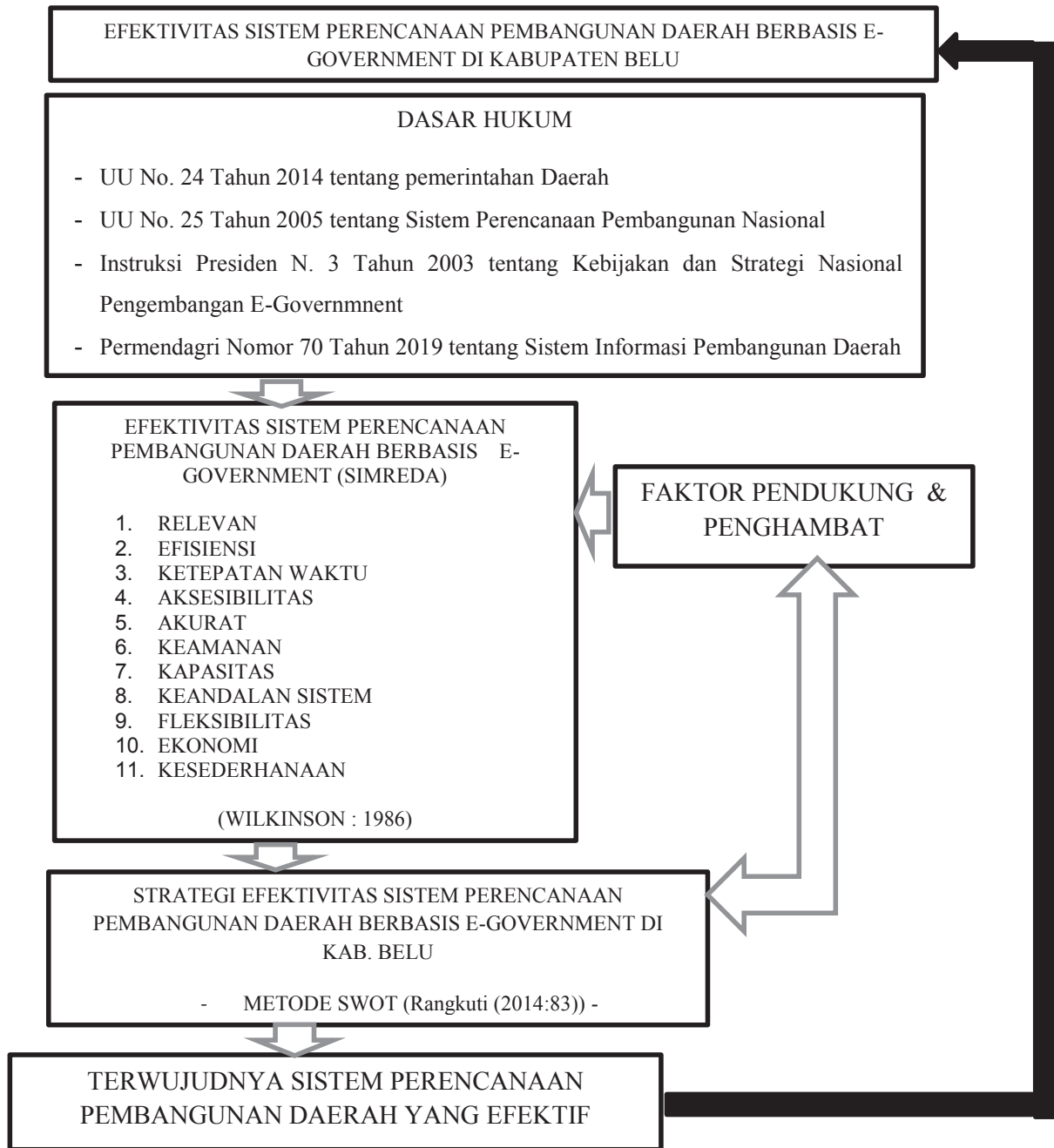
Perkembangan jaringan *e-government*/internet di Kabupaten Belu masih terbatas. Keterbatasan tersebut, tidak mengurangi

upaya pemerintah daerah dalam melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hal tersebut dapat dilihat dari aplikasi SIMREDA yang dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

### Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada 2020.

### KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2  
Kerangka Pemikiran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Matriks Analisis SWOT

Tabel 2 Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-Government* di Kabupaten Belu

<b>Faktor Internal</b>	<b>STRENGTHS (S)</b> 1. Pimpinan memiliki <i>e-leadership</i> 2. Memiliki Laboratorium Komputer 3. Etos kerja pegawai yang cukup tinggi 4. Adanya peraturan daerah yang menyatakan secara jelas peran/tupoksi BP4D di bidang perencanaan	<b>WEAKNESS (W)</b> 1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) 2. Kurangnya sarana prasarana 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang IT 4. Kurangnya analisis, penelitian dan kelengkapan data pendukung perencanaan serta belum optimalnya database perencanaan
<b>Faktor Eksternal</b>	<b>OPPORTUNITIES (O)</b> 1. Berada di daerah perbatasan dengan negara lain 2. Teknologi sistem informasi yang semakin canggih guna mendukung pengelolaan data 3. Kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan 4. Besarnya potensi daerah yang dimiliki	<b>Strategi SO</b> 1. Menggunakan laboratorium Komputer untuk mengadakan pelatihan kepada semua Operator SIMREDA setiap OPD di Kabupaten Belu 2. Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada upaya pemanfaatan potensi daerah yang ada
	<b>THREATS (T)</b> 1. Kebijakan penataan pegawai yang sesuai kompetensi belum optimal 2. Kurangnya koordinasi antar OPD serta persepsi dan kemampuan perencanaan yang belum sama dikalangan perangkat daerah 3. Peraturan/Regulasi yang berubah-ubah 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	<b>Strategi WO</b> 1. Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIMREDA dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Melakukan analisis, penelitian, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan data/informasi perencanaan
	<b>Strategi ST</b> 1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan antar OPD 2. Peningkatan perencanaan partisipatif	<b>Strategi WT</b> 1. Peningkatan kualitas pelaporan dan capaian akuntabilitas kinerja 2. Terbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk mengatasi peraturan yang berubah-ubah

Sumber: Rangkuti (2014: 83), data diolah oleh Peneliti Tahun 2020

GunamengetahuisejauhmanaEfektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-Government* di Kabupaten Belu. Berikut hasil wawancara dan pengembangan teori yang telah telah peneliti lakukan selama mengadakan penelitian ini.

### Relevan

Pemerintah pusat menggunakan aplikasi yang dinamakan SIPD (Sistem Informasi

Pembangunan Daerah). Sistem tersebut mengintegrasikan *e-planning* dan *e-budgeting* di tingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Belu masih mengalami kendala karena masih menggunakan aplikasi *e-planning* SIMREDA di mana aplikasi ini juga belum tersambung dengan *e-budgeting* SIMDA. Oleh karena itu, sistem tersebut juga belum terkoneksi/



terintegrasi dengan SIPD pada pemerintah pusat (Kemendagri) dan masih berlaku lokal sebatas di Kabupaten Belu.

### Efisien

Penggunaan aplikasi *e-planning* SIMREDA telah membuat pemerintah daerah Kabupaten Belu melakukan penghematan anggaran. Hasil yang dicapai juga dalam waktu yang lebih maksimal dan cepat. Hal tersebut disebabkan dokumen-dokumen perencanaan yang telah selesai diinput bisa langsung dilakukan perbaikan/revisi secara online tanpa harus di-*print* terlebih dahulu. Hasil *print* dokumen perencanaan adalah hasil akhir yang telah disepakati bersama Tim Teknis dari BP4D.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan fakta di lapangan bahwa sejak penggunaan *e-planning* SIMREDA Pemerintah Daerah Kabupaten Belu telah melakukan penghematan anggaran dalam program kegiatan Alat Tulis Kantor (ATK) pada semua OPD.

### Ketepatan Waktu

Dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMREDA) memasukkan data merupakan hal yang wajib dan bersifat berkelanjutan, oleh karenanya informasi yang disediakan harus berupa informasi yang *up to date* atau yang terbaru. Waktu untuk proses penginputan/pengisian dokumen perencanaan pembangunan berbeda-beda antara satu OPD dengan OPD yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh cakupan/beban kerja OPD tersebut. Dinas/badan Teknis, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR yang memiliki beban kerja yang kompleks di mana memiliki banyak program dan kegiatan proses penginputannya biasanya agak lebih lambat dari OPD seperti kelurahan dan kecamatan atau dinas Perpustakaan. Secara umum, Aplikasi SIMREDA telah mempercepat proses perencanaan pembangunan daerah berbasis aplikasi.

### Aksesibilitas

Kemudahan akses pelayanan SIMREDA dalam memproses data perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan Daerah adalah Sistem Informasi Online dengan seluruh OPD Kabupaten Belu dalam mengusulkan kegiatan, menyusun RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD Kabupaten Belu. Akses fisis ke fasilitas komputer harus dibatasi pada pribadi-pribadi yang berwenang. Hanya personel operator SIMREDA, pejabat dan manajemen sistem informasi SIMREDA yang boleh mempunyai akses yang berwenang ke fasilitas komputer. Sedangkan aksesibilitas untuk Operator cukup baik di mana para admin setiap OPD bisa melakukan login dan penginputan dengan baik. Masyarakat perlu disosialisasikan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan informasi yang ada pada SIMREDA. Hal tersebut dimaksudkan supaya masyarakat dapat mengikuti usulan yang sudah diusulkan dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Selain itu, dapat menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Belu.

### Akurat

Keakurasian SIMREDA telah menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang baik sehingga telah berdampak pada penganggaran dan penyerapan anggaran yang baik pula. Keakuratan dan kebenaran data entri pada aplikasi nantinya akan menjadi informasi yang benar-benar akurat dan juga dalam laporan pelaksanaan kinerja dan penggunaan uang negara. Dengan otomatisasi yang ada, dan perencanaan anggaran berbasis online, diaplikasikan untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan manual. Untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran maka dibutuhkan suatu perangkat yang akurat. Hal tersebut juga sebagaimana oleh Drucker dalam Moenir yang menyatakan

bahwa efektivitas adalah melakukan sesuatu tepat pada sasaran.

### Keamanan Sistem

Penggunaan aplikasi SIMREDA di Kabupaten Belu selama kurang lebih tiga (3) tahun tidak terjadi kebocoran data (dihack) oleh orang lain. Keamanan informasi pada sistem dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan dan integritas di dalam SIMREDA sendiri. Melindungi data dan informasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berkeinginan untuk mengubah informasi yang telah diinput tersebut. Salah satu langkah untuk menjaga kerahasiaan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-government* adalah hanya mengimbau kepada setiap Operator SIMREDA untuk tidak memberitahukan *password* dan *user* masing-masing OPD kepada orang lain karena hal tersebut bersifat rahasia.

### Kapasitas Sistem

Penginputan dokumen perencanaan pembangunan daerah setiap kali dilakukan serentak oleh setiap OPD ketika diperintahkan oleh Tim teknis dari BP4D Kabupaten Belu. Ketika input dokumen yang dilakukan secara serentak aplikasi SIMREDA dapat menjangkau semuanya dan tidak mengalami gangguan. Kapasitas Sistem SIMREDA dalam menampung semua data perencanaan pembangunan daerah baik itu RPJPD, RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja dalam beberapa tahun terakhir menjadikan aplikasi *e-planning* sebagai aplikasi yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas manajemen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Belu.

### Fleksibilitas

Usulan-usulan perencanaan pembangunan dapat diajukan oleh masyarakat dengan melalui Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kecamatan. Selain itu, masyarakat Kabupaten Belu

dimudahkan untuk mengajukan usulan perencanaan melalui aplikasi SIMREDA. Hal tersebut dimaksudkan untuk masyarakat yang tidak sempat mengikuti Musrenbang dapat melakukan usulan perencanaan dengan menggunakan aplikasi berbasis online. Masyarakat juga dapat mengetahui arah pembangunan atau kinerja Pemerintah Kabupaten Belu pada akhir tahun, di mana program dan kegiatan mana saja yang sudah dijalankan maupun yang belum dijalankan.

### Ekonomis

Anggaran operasional SIMREDA di Kabupaten Belu masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat di mana dalam setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Belu hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp355 – Rp375 juta (sesuai keadaan tiga tahun terakhir). Dari alokasi anggaran tersebut dibagi lagi di mana 65% diperuntukkan bagi honorarium tenaga pengelola aplikasi SIMREDA sedangkan 35% anggaran digunakan untuk biaya operasional pemeliharaan operasional peralatan dan perangkat pendukung lainnya. Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan *e-planning* SIMREDA.

### Kesederhanaan

Pengoperasian aplikasi SIMREDA mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Operator SIMREDA dapat memahami menggunakan SIMREDA walaupun tahapan/prosesnya panjang dalam penginputan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Operator tentunya selalu dibekali dengan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Diklat tersebut dari 2017 sampai dengan 2019 telah diadakan sebanyak enam (6) kali, di mana empat (4) kali Diklat diadakan di Kabupaten Belu (BP4D) dan dua (2) kali Diklat diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Belu, yaitu di Surabaya dan Jakarta. Dengan mengikuti berbagai pelatihan

tersebut diharapkan Operator SIMREDA dapat dengan mudah memahami dalam menggunakan SIMREDA dalam mendukung proses perencanaan di Kabupaten Belu.

## SIMPULAN

Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-government* di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur belum efektif. Hal ini tampak dari sebelas (11) indikator efektivitas sistem (Wilkinson: 1992), sebagai berikut.

- a. Relevan, hubungan keterkaitan aplikasi *e-planning* dengan data perencanaan pembangunan data yaitu aplikasi SIMREDA sebagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah sebelum ke tahap penganggaran. Sedangkan dalam hal integrasi sistem, aplikasi SIMREDA BP4D belum terkoneksi dengan SIMDA BPKAD.
- b. Efisien, dengan menggunakan aplikasi SIMREDA, pemerintah daerah telah melakukan penghematan, seperti tinta dan kertas (ATK) yang dibutuhkan untuk melakukan *print* dokumen semakin berkurang karena data dokumen perencanaan dilakukan revisi/ perbaikan secara online.
- c. Ketepatan Waktu, untuk memproses data dokumen perencanaan pembangunan daerah semakin cepat dengan menggunakan aplikasi *e-planning* (SIMREDA). Hal tersebut dilihat dari penginputan data dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah ada yang bisa menyelesaikan dalam tempo waktu empat jam. Berbeda dengan dulu masih belum menggunakan aplikasi SIMREDA, waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah bisa dilakukan sehari-hari.
- d. Aksesibilitas SIMREDA, para admin/ Operator setiap OPD bisa melakukan *login* dan penginputan dengan menggunakan *user* dan *password* masing-masing yang ditentukan. Aksesibilitas di masyarakat masih rendah karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi.
- e. Keakuratan sistem SIMREDA, sudah sangat akurat. Hal tersebut dapat dilihat dari program dan kegiatan yang tidak tumpang tindih dan tidak terjadi kesalahan penghitungan angka-angka.
- f. Keamanan sistem 100% aman karena sudah sesuai ketentuan, sehingga tidak ada ruang gerak bagi hacker/orang lain untuk mengutak atik anggaran yang telah disepakati.
- g. Kapasitas sistem pada aplikasi SIMREDA, yaitu dapat menampung dan memproses semua data dokumen perencanaan daerah. Data usulan perencanaan pembangunan daerah dari masyarakat (musrenbang) dan dari semua OPD ditampung setiap tahunnya dan diperbaharui sesuai kebutuhan.
- h. Keandalan sistem, pengoperasian aplikasi SIMREDA jarang bahkan tidak mengalami gangguan/*error system*. Gangguan biasanya dari jaringan internet yang belum stabil.
- i. Fleksibilitas SIMREDA, informasi perencanaan pembangunan daerah dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Belu dengan membuka laman/website [<http://simreda.belukab.go.id/web/home>].
- j. Ekonomi, adanya dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Belu. Anggaran untuk aplikasi *e-planning* masih rendah namun terus dilakukan peningkatan alokasi anggaran *e-planning* setiap tahun.
- k. Kesederhanaan, aplikasi SIMREDA mudah digunakan/dioperasikan oleh Operator BP4D dan operator setiap OPD.

## SARAN

Berdasarkan analisis SWOT dan Uji Litmus, maka didapatkan strategi dalam mengatasi faktor-faktor penghambat Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *E-Government* di Kabupaten Belu disarankan sebagai berikut.

- a. Menggunakan laboratorium Komputer untuk mengadakan pelatihan kepada semua Operator SIMREDA setiap OPD di Kabupaten Belu
- b. Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada upaya pemanfaatan potensi daerah yang ada
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIMREDA dalam perencanaan pembangunan daerah
- d. Melakukan analisis, penelitian, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan data/informasi perencanaan
- e. Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan antar OPD, serta perencanaan partisipatif
- f. Peningkatan kualitas pelaporan dan capaian akuntabilitas kinerja.
- g. Terbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk mengatasi peraturan yang berubah-ubah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Adrianto, Nico. 2007. *Good E-Government Tansparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government*. Bayumedia Publishing. Malang
- Anttiroiko, Veikko, Ari. 2008. *Electronic Government: Concepts, Metodologis, Tool, and Application*. United States of America: Information Science and Reference.
- Arikunto.Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
- Bintoro, Tjokromidjojo. 1992. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji M a s a Agung.
- Budiati, Ayuning. 2003. *Improving E-government Implementation to Enhance Publik Service Delivery in Indonesia*. Monash University. Australia
- Bryson, John M, 2016, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Terjemahan M. Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, A Dennis. 2013. *Decentralizing Governance*. Washington D.C.: Brooking Institute Press
- Effendy, Khasan, 2009, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, Indra Prahasta, Bandung
- Erliana.Hasan, 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Ghalia Indonesia.
- Gibson, Ivancevich, Donnely, 2005, *Organisasi*, alih bahasa Nunuk Adiami, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hunger, J.David & Wheelen, Thomas.L, 1996. *"Manajemen Strategis"*, Andi.Yogyakarta
- Ibnu Syamsi. 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Ilmu Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Indrajit, R. Eko dkk. 2005. *E-Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Indrayani, Etin dan Gatningsih. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi*

- Pemerintahan/Pemda*. Sumedang: IPDN Press
- James, A.F. Stoner. 1992. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Kumar, T. M. Vinold. 2015. *E-Government for Smart City*. Singapore: Springer.
- Komaruddin. 2004. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Makmur. 2005. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manan, Bagir. 2004. *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moenir. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M, 2011, *Metode Penelitian. Edisi Ketujuh*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Norris, F, Donald. 2007. *Current Issues and Trends In E-Government Research*. United States Of America: Cyberthech Publishing.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*, Jilid 1. Bandung: Penerbit Gramedia
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syahroni. 2005. *Pengertian Dasar dan Genetik tentang perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: GTZ
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Ratminto, Atik. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Riyadi & Deddy Supriady, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Salam, Dharma Setyawan, 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian, P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjafrizal. 2006. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta.
- Soekartawi. (1990). *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Rajawali Press.
- Sugiyono, 2013. *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta.
- Suradinata, Ermaya 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: CV Ramadan.
- Suradinata. Ermaya. 2014. *Analisis Kepemimpinan Strategi Pegambilan Keputusan (ASOCA)*. Jatinangor: Alqaprint Jatinangor
- Tampubolon, Manahan P. 2012. *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.
- Weill, Peter dan Ross, Jeanne W. 2004. *IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Right for Superior Result*, Havard Business School Press, USA.
- Wilkinson, W, Joseph, *Sistem Akuntansi dan Informasi*. Terjemahan Marianus Sinaga. Jakarta: Erlangga.
- Yamit, Zulian. 2005. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta: Ekonesia

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

#### **Website Elektronik**

**<http://simreda.belukab.go.id/web/home>**  
Website/Beranda SIMREDA Kabupaten Belu

**<https://www.indotelko.com/liputankhusus/drivetest/read/1507088495/telkomsel-di-atambua>** provider jaringan telekomunikasi di Kab. Belu